



Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan: Pendekatan dan Tantangan

Mela Safitri Situmorang^{1*}, Aulia Sari Damanik², Tengku Darmansyah³

^{1,2,3}Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: melasafitrisitumorang@gmail.com¹, aulia101015@gmail.com², teng kudarmansyah@uinsu.ac.id³

*Korespondensi penulis: melasafitrisitumorang@gmail.com

Abstract. *The purpose of writing this article is to find out in full about the Effectiveness of Monitoring and Evaluation in the Implementation of Educational Policy approaches and challenges. This article is compiled by means of a literature study using qualitative research methods. Monitoring and evaluation (M&E) of educational policy is a systematic process used to measure, monitor, and assess the implementation of educational policies and their impact on predetermined objectives. Monitoring and evaluation (M&E) plays an important role in ensuring the success of educational policy implementation. This article examines the main approaches used in M&E of educational policies and the challenges faced in the process. This article provides strategic recommendations for improving the effectiveness of M&E in the educational context, so that policies can produce significant and sustainable impacts.*

Keywords: *Monitoring, Evaluation, Policy, Education.*

Abstrak. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui secara utuh tentang Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan pendidikan: pendekatan dan tantangan. Artikel ini disusun dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Monitoring dan evaluasi (M&E) kebijakan pendidikan adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan menilai pelaksanaan kebijakan pendidikan serta dampaknya terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi (M&E) memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Artikel ini mengkaji pendekatan utama yang digunakan dalam M&E kebijakan pendidikan serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Artikel ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas M&E dalam konteks pendidikan, sehingga kebijakan dapat menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Monitoring, Evaluasi, Kebijakan, Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Menilai efektivitas suatu kebijakan harus melalui beberapa tahapan proses secara garis besar melalui tindakan pengawasan dan evaluasi. Tindakan pengawasan dalam suatu kebijakan publik diperlukan informasi yang sesuai, dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sementara itu, tindakan evaluasi suatu kebijakan publik sebagai penilaian terhadap hasil-hasil program (proyek) kebijakan untuk meninjau seberapa jauh tujuan dari program kebijakan terlaksana.

Langkah panjang dari suatu proses kebijakan bermuara pada bagian implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya, proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Artinya, sebagus apapun rumusan dan formulasi kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi. Oleh sebab itu,

sesederhana apapun untuk tidak mengatakan jelek atau buruk- rumusan dan formulasi kebijakan, jika dilaksanakan maka akan memiliki nilai manfaat.

Senada dengan pendapat di atas, Dunn (2003) mengilustrasikan secara rinci fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu, di mana implementasi merupakan bagian didalamnya. Fase pertama, adalah penyusunan agenda, Fase kedua adalah formulasi kebijakan, Fase ketiga adalah adopsi kebijakan, Fase keempat adalah implementasi kebijakan, Dan fase terakhir adalah penilaian kebijakan.

Dalam pelaksanaan LS, monitoring dan evaluasi (Monev) adalah bagian integral dalam implementasinya. Menurut Dikti (2009), Monev pada dasarnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti: 1) Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi; 2) Mengembangkan alat-alat pemantauan dan evaluasi yang diperlukan; 3) Melaksanakan monev dengan menggunakan mekanisme, prosedur, dan instrumen yang telah dikembangkan; (4) Mengomunikasikan temuan-temuan kepada dekan sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan pengendalian program; 5) Mengomunikasikan temuan-temuan monev secara berkala kepada dekan LPTK sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan pengendalian program; dan 6) Mengomunikasikan temuan-temuan monev kepada pihak pelaksana program di lapangan dalam workshop evaluasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Karya tulis ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui pendekatan Penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kepustakaan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain menggunakan pengetahuan dari teks atau data numerik, bukan dari apa yang dirasakan di lapangan, dan peneliti biasanya tidak terjun langsung ke lapangan. Perpustakaan dan sumber daya online juga merupakan sumber data yang berharga bagi para peneliti. Selain itu, data bekas juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Data di peroleh dengan cara menelaah dan mengkaji berapa informasi dan teori yang telah di kemukaan oleh para ahli yang bersumber dari koleksi dan arsip kepustakaan berupa buku, artikel jurnal penelitian, majalah dan beberapa sumber dari internet dan sumber lainnya yang di anggap sesuai dengan masalah yang sedang di kaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program (Kemendikbud, 2013). Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi.

Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, negara bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman. Dapat di simpulkan bahwa Monitoring kebijakan pendidikan berarti mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan yang ada.

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses yang sistematis untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan kebijakan, serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Menurut Darling-Hammond (2017), evaluasi kebijakan pendidikan harus didasarkan pada data empiris dan mencakup berbagai indikator yang relevan, seperti hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang dampak kebijakan .

Monitoring evaluasi kebijakan pendidikan berhubungan dengan mendapatkan premis faktual suatu kebijakan, dengan bergerak mundur dari apa yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan apa yang telah terjadi sebelumnya (*ex post facto*). Monitoring dan Evaluasi (ME) kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik di tingkat mikro (sekolah), meso (dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi), maupun makro (kementerian). Monitoring kebijakan pendidikan adalah suatu proses

pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan MBS. Jadi, fokus monitoring kebijakan pendidikan adalah pemantauan pada pelaksanaan MBS, bukan pada hasilnya. Tepatnya, fokus monitoring adalah pada komponen proses MBS, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. Sedang evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil MBS. Jadi, fokus evaluasi kebijakan pendidikan adalah pada hasil MBS.

Informasi hasil ini kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. ME pada MBS bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberi masukan (umpan balik) bagi perbaikan pelaksanaan MBS. Sedang hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan komponen MBS, baik pada konteks, input, proses, output, maupun outcomenya. Masukan-masukan dari hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Pendekatan Dalam Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Pendekatan evaluasi yang komprehensif mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses implementasi kebijakan dan bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan segera. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan dan bertujuan untuk menilai keseluruhan efektivitas kebijakan tersebut. Fullan (2015) menekankan bahwa kombinasi antara evaluasi formatif dan sumatif dapat memberikan pandangan yang lebih lengkap dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan pendidikan meliputi kualitas data yang dikumpulkan, metodologi evaluasi yang digunakan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Kualitas data yang baik sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat dan relevan. Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa data yang komprehensif dan reliabel memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam dan tepat sasaran, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan .

Metodologi evaluasi yang digunakan juga mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan pendidikan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif harus digunakan secara sinergis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Menurut Penuel (2016), penggunaan metodologi campuran (mixed methods) memungkinkan evaluasi untuk menangkap berbagai aspek dari implementasi kebijakan dan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang efektivitas

kebijakan. Partisipasi pemangku kepentingan dalam proses evaluasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan realitas di lapangan dan relevan dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan aktif dari guru, siswa, orang tua, dan komunitas dapat meningkatkan akurasi dan relevansi data yang dikumpulkan.

Datnow (2020) menemukan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan pendidikan meningkatkan kualitas hasil evaluasi dan mendukung penerimaan serta implementasi rekomendasi yang dihasilkan. Untuk memahami evaluasi kebijakan dapat digunakan pendekatan-pendekatan. Jenis-jenis pendekatan evaluasi terhadap suatu kebijakan diungkapkan oleh William Dunn adalah sebagai berikut (Affrian, 2020, p. 10; Firyal & Mohi, 2018, p. 21; Halimah, 2020, p. 37).

1) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*)

Evaluasi semu adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait output kebijakan dengan tidak memperhatikan tujuan dari hasil tersebut terhadap keseluruhan masyarakat atau individu karena berasumsi bahwa nilai mengenai tujuan atau hasil adalah sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self-evident*).

2) Evaluasi formal (*formal evaluation*)

Evaluasi formal adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya guna mengevaluasi output kebijakan berdasarkan tujuan yang telah dipublikasikan secara formal oleh pembuat kebijakan seperti dokumen undang-undang. Asumsi dari evaluasi formal bahwa tujuan merupakan ukuran yang sesuai untuk menilai suatu kebijakan.

3) Evaluasi keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*).

Evaluasi keputusan teoritis adalah evaluasi dengan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dengan berusaha menunjukkan eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan yang terselubung atau dimunculkan.

Indikator Keberhasilan dalam Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Monitoring dan evaluasi (M&E) kebijakan pendidikan dianggap berhasil apabila sejumlah indikator utama terpenuhi. Pertama, pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, yang meliputi peningkatan angka partisipasi pendidikan, penurunan angka putus sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, atau pemerataan akses pendidikan. Misalnya, apabila kebijakan bertujuan meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, keberhasilan dapat

diukur dari jumlah anak yang kembali bersekolah atau meningkatnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut (Sumarto, 2020).

Kedua, keberlanjutan program menjadi indikator penting lainnya. Keberlanjutan berarti kebijakan yang diterapkan tidak hanya memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, atau teknologi. Keberlanjutan ini biasanya terlihat dari integrasi kebijakan ke dalam sistem pendidikan nasional atau daerah, serta dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang sukses adalah yang memanfaatkan sumber daya (anggaran, waktu, dan tenaga) secara optimal untuk memberikan hasil maksimal. Evaluasi akan melihat apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Efektivitas juga berkaitan dengan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif, seperti peningkatan kualitas pendidikan atau pengurangan kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Keempat, keberhasilan M&E juga dapat diukur melalui kepuasan pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan pemerintah daerah. Pemangku kepentingan yang merasa kebijakan tersebut bermanfaat dan relevan menunjukkan bahwa kebijakan telah berhasil menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada. Selain itu, dampak nyata terhadap masyarakat, seperti peningkatan keterampilan siswa atau pengurangan angka pengangguran, menjadi penanda keberhasilan lainnya.

Tantangan dalam Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Meskipun penting, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya data yang akurat, valid, dan terkini. Banyak negara atau daerah, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya, menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. Data yang tidak lengkap atau tidak valid dapat menghambat evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung proses evaluasi. Monitoring dan evaluasi membutuhkan sumber daya yang cukup besar, termasuk untuk melatih evaluator, melakukan survei, dan menggunakan teknologi analitik. Dalam banyak kasus, alokasi anggaran lebih difokuskan pada implementasi kebijakan dibandingkan pada proses evaluasi, sehingga evaluasi sering kali dilakukan secara minimal atau bahkan diabaikan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas evaluator juga menjadi kendala. Evaluator memerlukan pemahaman mendalam tentang kebijakan pendidikan, metode evaluasi, serta

kemampuan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi yang relevan. Namun, di banyak tempat, pelatihan evaluator belum memadai, sehingga hasil evaluasi sering kurang optimal. Resistensi dari pemangku kepentingan juga dapat menjadi tantangan. Beberapa pihak mungkin merasa tidak nyaman dengan proses evaluasi, terutama jika hasil evaluasi berpotensi menunjukkan kelemahan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat memicu konflik atau bahkan penolakan terhadap rekomendasi evaluasi (Trivanhu, 2017).

Selain itu, keragaman geografis dan sosial budaya menambah kompleksitas dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan. Indonesia, misalnya, memiliki wilayah yang sangat luas dengan beragam kondisi sosial budaya. Kebijakan yang berhasil di suatu daerah belum tentu relevan atau efektif di daerah lain. Oleh karena itu, evaluasi harus mampu menyesuaikan konteks lokal, yang sering kali memerlukan pendekatan tambahan dan tenaga ahli yang lebih banyak.

Tantangan lainnya adalah mengukur dampak jangka panjang. Kebijakan pendidikan sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum hasilnya benar-benar terlihat. Hal ini membuat evaluasi dampak menjadi sulit dilakukan dalam jangka waktu singkat, sehingga pemerintah cenderung lebih fokus pada hasil jangka pendek (Philips, 2015).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan sistematis yang melibatkan semua pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas evaluator, dan investasi yang cukup dalam proses monitoring dan evaluasi. Hal ini penting agar kebijakan pendidikan tidak hanya berhasil diterapkan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal.

Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problema-problema tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas.

Ketidakjelasan tujuan demikian diakibatkan oleh adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus demikian dipaksakan karena memang dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya. Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa mejadi penyebab formulasi kebijakan tersebut tidak disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui berarti tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, tujuan yang dirumuskan umumnya kabur dan bisa bermakana ganda. Padahal gandanya makna justru menyulitkan evaluasinya.

- 2) Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Ini menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena itu masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga sudah berubah dan berganti

dengan masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi kebijakan sudah tidak ada, sementara masalah baru yang bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah lama muncul.

- 3) Tidak jelas masalahnya, sumber masalah dan gejala masalahnya.

Ketidajelasan demikian bisa terjadi karena antara masalah, sumber masalah, dan gejala masalah sudah tumpang tindih. Hal ini terjadi karena masalah-masalah tersebut golongan masalah sosial, antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang saling interchange.

- 4) Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain.

Sebagai contoh: sukar memisahkan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab masyarakat yang bodoh dan terbelakang cenderung miskin, dan sebaliknya pada masyarakat yang miskin juga cenderung bodoh dan terbelakang.

- 5) Subjektifnya masalah kebijakan.

Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang satu dengan menurut persepsi orang lain. Bahkan sesuatu yang oleh seseorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, justru dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan dan oleh karena itu harus dipertahankan.

Selain itu ditemukan juga problem-problem dalam melakukan evaluasi dan monitoring itu diantaranya:

Kebijakan publik kadang tidak memiliki tujuan yang jelas, yang diakibatkan dari pertimbangan politis. Ketidajelasan tujuan meliputi: (1) tujuan yang tidak mungkin dicapai; (2) tujuan yang kontradiktif; (3) tujuan yang terlalu sempit atau terlalu spesifik; dan (4) tujuan antara atau tujuan sementara.

Pengukuran (*measurement*), menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Misalnya persoalan efisiensi: perbandingan cost - benefit atau input - output, sangat sulit untuk mengukur cost maupun benefit khususnya untuk persoalan sosial. Contoh lain persoalan efektivitas: sulit dilihat khususnya yang menyangkut kualitasnya.

Kelompok sasaran (*target groups*), yang perlu diperhatikan adalah program meskipun berdampak pada keseluruhan populasi sasaran, tetapi belum tentu memiliki dampak terhadap kelompok sasaran. Seringkali terjadi justru bukan kelompok sasaran yang memperoleh manfaat program tetapi kelompok lain dalam populasi tersebut, yang kadang disebabkan bias birokrasi.

Sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Seorang analis kebijakan terkadang sulit untuk menterjemahkan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Padahal pertimbangan sistem nilai tidak dapat diabaikan dalam melakukan evaluasi kebijakan (Nasihu, 2022).

4. KESIMPULAN

Monitoring berfungsi mengamati progres implementasi kebijakan, sedangkan evaluasi bertujuan menilai efektivitas dan dampak kebijakan. Pendekatan yang digunakan meliputi evaluasi formatif untuk perbaikan proses implementasi secara langsung dan evaluasi sumatif untuk menilai hasil keseluruhan setelah kebijakan dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan mencakup pengelolaan data yang berkualitas, penggunaan metodologi campuran untuk pemahaman yang lebih holistik, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan untuk memastikan evaluasi mencerminkan realitas lapangan. Indikator keberhasilan meliputi pencapaian tujuan kebijakan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, keberlanjutan program, serta kepuasan pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi pemangku kepentingan, dan kesulitan menyesuaikan kebijakan dengan keragaman lokal. Selain itu, masalah seperti data yang tidak valid, metodologi evaluasi yang kurang tepat, dan kendala dalam mengukur dampak jangka panjang juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas evaluator, penguatan institusi, dan penggunaan teknologi untuk mendukung Monitoring dan evaluasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan.

REFERENSI

- Achmad Nasihi, & Ratna Hapsari, T. A. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 77–88.
- Ade, G. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), December.
- Arwildayanto, A., dkk. (2018). *Analisis kebijakan pendidikan: Kajian teoretis, eksploratif, dan aplikatif*. CV Cendekia Press.
- Azizah, N. N., dkk. (2023). Evaluasi kebijakan pendidikan. *Ta'lim Jurnal: Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
- Burhan, B. (2007). *Penelitian kualitatif*. Kencana.
- Dunn, N. W. (2016). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gajah Mada University Press.
- Mardiah, M., & Syarifudin, S. (2019). Model-model evaluasi pendidikan. *Mitra ash-shibyan: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2(1), 38–50.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1), 77–88.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Phillips Dillah. (2015). *Metode penelitian hukum*. Alfabeta.
- Sary, Z., dkk. (2024). Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Sumarto. (2020). *Supervisi pendidikan Islam*. Buku Literasiologi.
- Supandi, M., dkk. (2021). Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 3(2), 215–227.
- Tirivanhu Berharga, & Madri Jansen van Rensburg. (2017). Menilai responsivitas gender dari pemantauan dan evaluasi pemerintah sistem di Afrika Selatan. *Development Southern Africa*.
- Warman, dkk. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3, Special Edition, 25–32.